

PERAN POLITEKNIK MENGEMBANGKAN UMKM DALAM PERSAINGAN GLOBAL

Prayitno

Politeknik Trisila Dharma Tegal

Pra.yitno.py17@gmail.com

Hesti Widianti

Politeknik Harapan Bersama

Tabrani

Universitas Pancasakti

Abstrak

The trend of globalization followed by uncontrolled technological changes has resulted in the growth of businesses that are increasingly changing, those changes must automatically be followed by local actors but the local actors who initially because by accident are unable to compete with large-scale business sectors that start their business by design, experience micro small and Medium Enterprises is good but not supported by good formal knowledge so the results will be inferior to those designed so that the role of polytechnics is needed to provide applicative solutions needed by the micro small and Medium Enterprises actors, polytechnics need an applicable solution because polytechnic education concepts are more practiced than academic. The polytechnic has the role of providing theory and practice in management, accounting, marketing, relationships with banks, networks and practical solutions so that SMEs are able to compete with large companies.

Keywords: globalization, vocational education, applicable

PENDAHULUAN

Sementara Negara – Negara maju tulang punggung ekonominya ditopang oleh umkm sebab Usaha kecil dan menengah memainkan peran kunci dalam ekonomi, Miloš Mrvaa, Paulína Stachová [1] tidak cukup hanya slogan saja namun pemerintah Negara maju seperti Uni Eropa menghendaki umkm di Negaranya meju terbukti dengan membuat strategi Lisbon

yang diluncurkan pada tahun 2000 dengan tujuan Uni Eropa mulai menerapkan kebijakan untuk menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik serta mengembangkan kohesi sosial yang lebih besar, sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebab Uni Eropa menyadari bahwa akan kehilangan daya saing di tingkat global

dalam beberapa dekade terakhir maka menyiapkan beberapa dokumen penting, dengan tujuan menjadikan Uni Eropa ekonomi berbasis pengetahuan paling kompetitif dan dinamis di dunia, Miloš

Mrvaa, Paulína Stachováa, kemudian terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan maka pada 3 Maret 2010 Komisi Eropa membuat program "Strategi Eropa 2020 [2] untuk pertumbuhan cerdas, berkelanjutan dan inklusif". Tujuannya untuk memimpin negara-negara Uni Eropa ke tingkat ketenagakerjaan, produktivitas, dan kohesi sosial yang tinggi. Uni Eropa menyadari bahwa pemain kunci adalah perusahaan, kebanyakan UMKM, yang berkontribusi dengan proporsi besar untuk pekerjaan dan produktivitas secara keseluruhan. Jelas bahwa tanpa dukungan UMKM, ekonomi Eropa tidak dapat bersaing secara internasional. Namun berbeda dengan yang terjadi di Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa dengan sebagian besar wilayah lautan, mata pencaharian utama pertanian namun sejak tahun 2010 program pemerintah diarahkan ke sektor industri besar hal ini kebalikan dari kebijakan Uni Eropa bahwa Usaha kecil dan menengah memainkan peran kunci dalam ekonomi seluruh Uni Eropa, Miloš Mrvaa, Paulína Stachováa, [1].

Kebijakan – kebijakan itu tertuang dalam paket kebijakan “Paket Kebijakan Deregulasi Ekonomi” [3] yang bertumpu pada Meningkatkan daya saing industri, daya beli masyarakat, investasi, ekspor,

wisata, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dijelaskan dalam 12 paket kebijakan ekonomi diantaranya adalah :

Paket I, 9 Sept '15, Mendorong Daya Saing Industri: Mengurangi Dan Menyederhanakan Regulasi Serta Mempermudah Birokrasi.

Paket Ii, 29 Sept '15, Promosi Investasi Dan Devisa: Kemudahan Perizinan Investasi (Izin 3 Jam), Dan Insentif Devisa Hasil Ekspor.

Paket Iii, 7 Oct '15, Perluasan Akses Pembiayaan Dan Pengurangan Biaya Produksi: Perluasan Cakupan Kur, Fasilitasi Jasa Keuangan, Pembiayaan Ekspor, Fasilitas Pertanahan, Dan Insentif Listrik, Bbm, Gas Bagi Industri

Paket Iv, 15 Oct '15, Jaminan Sistim Pengupahan Dan Pengamanan Phk: Sistem Pengupahan Yang Adil, Sederhana Dan Terproyeksi Serta Kredit Usaha Rakyat (Kur) Yang Lebih Murah Dan Luas.

Paket V, 22 Oct '15, Revaluasi Aset Dan Akses Pembiayaan Syariah: Insentif Pajak Bagi Perusahaan Yang Merevaluasi Aset, Dan Insentif Dana Investasi Real Estate, Serta Kemudahan Pembiayaan Syariah

Paket Vi, 6 Nov '15, Menggerakkan Ekonomi Di Wilayah Pinggiran Dan

Kelancaran Bahan Baku Obat: Insentif Kek, Pengairan, Dan Sistem Elektronik (Insw) Pengadaan Bahan Baku Obat.

Paket Vii, 7 Dec '15, Insentif Pajak Industri Padat Karya Dan Sertifikasi Tanah: Mendorong Daya Saing Industri Padat Karya Melalui Insentif Pph Pasal 21 Dan Kemudahan Sertifikasi Tanah.

Paket Viii, 21 Dec '15, Kepastian Usaha Dan Investasi Jasa Pemeliharaan Pesawat Terbang (Mro) Dan Minyak: One Map Policy Yang Mempermudah Penyelesaian Konflik Lahan, Upaya Meningkatkan Produksi Minyak Nasional, Dan Mendorong Jasa Mro

Paket Ix, 27 Jan '16, Infrastruktur Listrik Dan Logistik: Pemenuhan Listrik Rakyat, Stabilisasi Pasokan Daging, Dan Agregator Ekspor Ukm Untuk Pengembangan Logistik Desa Ke Pasar Global

Paket X, 11 Feb '16, Keterbukaan Investasi: Perubahan Kebijakan Daftar Negatif Investasi Yang Menjamin Efektivitas Pelaksanaan Investasi, Meningkatkan Perlindungan Dan Pengembangan Ukm Dan Koperasi, Serta Mendorong Investasi Teknologi Tinggi, Padat Modal, Dan Wisata.

Paket Xi, 29 Mar '16, Akses Pembiayaan, Dwelling Time, Dan Industri Farmasi/Alkes: Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor, Insentif Bphtb Bagi Dire, Manajemen Resiko Untuk Kelancaran Arus Barang (Insw), Dan Pengembangan Industri Farmasi/Alkes

Paket Xii, 28 Apr '16, Peningkatan Peringkat Ease Of Doing Business (Eodb): Memangkas Izin, Prosedur, Waktu, Dan Biaya Untuk Kemudahan Berusaha Di Indonesia.

Paket kebijakan menjadi permasalahan baru bagi pelaku umkm sebab pelaku umkm di Indonesia berusaha bukan karena *by design* tetapi *by accident*, tidak memiliki penguasaan yang cukup untuk menjalankan usahanya hanya bertujuan mencari makan, pendidikan tidak tinggi sehingga sulit untuk mengikuti persaingan dengan perusahaan besar. Dampak dari kebijakan tersebut berakibat 60% dari umkm yang didirikan bangkrut selama tiga tahun pertama setelah didirikan, Marková, V. , mereka memiliki ide bisnis yang menarik tetapi tidak memiliki keterampilan manajerial dan pengetahuan ekonomi.. Seharusnya dengan “Paket Kebijakan Deregulasi Ekonomi” umkm akan mampu bersaing dengan industri besar sebab langkah – langkah strategis paket kebijakan didukung oleh perluasan

pendidikan vokasi, percepatan proyek strategis Nasional, reformasi anggaran Negara, pencabutan peraturan daerah yang menghambat kegiatan ekonomi, repatriasi dan deklarasi kekayaan.

Perluasan pendidikan vokasi menjadi kunci tumbuhnya umkm sebab pendidikan vokasi diharapkan bisa menjembatani antara pelaku umkm yang berpendidikan minim dengan hasil riset yang dilakukan oleh akademisi bisa diterapkan langsung dalam praktek tanpa teori yang sulit dipahami oleh pelaku umkm. Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, berkarya.um.ac.id. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan diploma I (D1), diploma II (D2), diploma III (D3) dan diploma IV (D4). Lulusan pendidikan vokasi mendapatkan gelar vokasi, misalnya A.Ma (Ahli Madya), A.Md (Ahli Madya). Program Vokasi adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global, UI. Secara khusus, program diploma III diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja tertentu sehingga dapat langsung

diserap sebagai tenaga kerja di industri/swasta, lembaga pemerintah atau berwiraswasta secara mandiri, hal ini karena beban pengajaran pada program pendidikan vokasi telah disusun lebih mengutamakan beban mata kuliah ketrampilan dibandingkan dengan beban mata kuliah teori. Namun selama ini yang terjadi pendidikan vokasi (dalam hal ini Politeknik yang ada di Indonesia pada umumnya) pembelajaran sama dengan program akademik yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Padahal pemerintah menghendaki supaya pendidikan vokasi aplikatif dilapangan sehingga berperan aktif menjadi motor penggerak perekonomian daerah, sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Dengan demikian perguruan tinggi tidak menjadi “menara gading”, namun membawa kesejahteraan bagi masyarakat, Mohamad Nasir, Menristekdikti, sehingga umkm menjadi media yang tepat sebagai laboratorium praktek nyata antara keilmuan dengan permasalahan yang dihadapi dunia usaha.

Politeknik membantu dari sisi akademis seperti manajemen, hubungan dengan perbankan, akuntansi, marketing, jaringan hingga mencarikan solusi praktis tentang permasalahan yang dihadapi pelaku umkm

sedangkan bagi pelaku umkm itu sendiri merasa tenang menjalankan usahanya karena ada back up dari pihak politeknik

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya dukungan usaha mikro kecil dan menengah serta dukungan pendidikan kewirausahaan. Dukungan kegiatan tersebut terkait dengan pengembangan masing-masing daerah. Penelitian ini berawal dari program pendampingan umkm yang sukses. Sebagai contoh nyata Tim Pengabdian dan Pengembangan umkm Politeknik trisila Dharma (TPP Poltrisdha), yang didirikan progdi akuntansi pada tahun 2016. Penelitian ini fokus pada umkm di wilayah Kabupaten Tegal dengan pengetahuan di bidang penelitian, pengetahuan tentang teori kewirausahaan oleh akademisi serta keadaan lingkungan bisnis dan pengalaman oleh pelaku umkm di Tegal dengan fokus pada UMKM. Metode analisis data dan sintesis, tinjauan pustaka dan peninjauan penelitian di lapangan, serta metode wawancara pribadi digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dunia industri di Kabupaten Tegal tidak begitu pesat selama kurun waktu 5 tahun terakhir,

SIPD Tegal [8] . Jumlah unit usaha industri kecil pada tahun 2011–2015 setiap tahun tetap yaitu 28.980 unit dan mengalami penurunan menjadi 24.362 unit. Demikian halnya dengan tenaga kerja yang terserap relatif stabil yaitu 115.421 orang dari tahun 2011-2013 dan menurun menjadi 107.831 orang pada tahun 2015 dengan nilai produksi sebesar Rp 781.348.000.000,-. Perkembangan yang serupa terjadi pada industri besar, yang selama lima tahun terakhir jumlah unit usahanya stagnan, tercatat pada tahun 2011 sebanyak 9 unit usaha besar mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.680 orang, dengan nilai produksi sebanyak Rp. 271.348.000.000,-. Sedangkan di tahun 2014 terdapat kenaikan jumlah unit usaha menjadi 16 dengan tenaga yang tererap meningkat menjadi 6.036 orang. Perkembangan stagnan terjadi pada industri rumah tangga, yang selama tiga tahun terakhir jumlah unit usahanya tidak mengalami penambahan, yaitu sebanyak 1.874 unit usaha mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 790 orang.

Untuk mendukung aktivitas perdagangan, pemerintah daerah menyediakan sarana perdagangan berupa pasar tradisonal yang jumlahnya sebanyak 26 unit tersebar di seluruh kecamatan dan 6 unit pasar

lokal. Selain itu, terdapat pula pasar swalayan sebanyak 4 unit dan 30 unit minimarket serta 1.271 unit pertokoan/warung/kios yang diprakarsai oleh pihak swasta. Keberadaan sarana perdagangan tersebut, semakin mendorong roda perekonomian di Kab.Tegal.

Untuk pengembangan usaha, telah tumbuh dan berkembang perkoperasian di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2014 ada sebanyak 575 unit koperasi primer yang berhasil dibentuk, 279 buah diantaranya masih aktif, dan sisanya sebanyak 296 keberadaannya tidak aktif. Koperasi primer tersebut, terdiri atas 24 buah KUD dan 551 non KUD. Dalam pengembangan usaha tidak hanya melibatkan pengusaha kecil, tetapi juga pengusaha menengah dan besar. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi UKM dan Pasar, jumlah pengusaha kecil selama lima tahun terakhir mengalami pasang surut, dan pada tahun 2011 terdapat 56.333 pengusaha kecil menengah, sedangkan tahun 2014 cenderung menurun yaitu sebanyak 29.134 pengusaha kecil menengah dengan jumlah tenaga kerja yang terserap 120.351 orang . Jumlah pengusaha besar tetap dalam lima tahun terakhir, yaitu 422 pengusaha besar. Masing-masing menyerap tenaga kerja sebanyak 6.036 orang.Sumber : Sistem

Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten Tegal Tahun 2016 (Cetak Th 2017)

Penelitian ini didasarkan pada UU No 20 th 2008 pasal 6 yang dimaksud dengan umkm adalah [9] :

No	Jenis Usaha	Keterangan	
1	Usaha Mikro	Kekayaan bersih ≤50jt	Hasil penjualan tahunan ≤300jt
2	Usaha Kecil	Kekayaan bersih 500jt ≥50jt	Hasil penjualan tahunan 2,5 milyar ≥300jt
3	Usaha Menengah	Kekayaan bersih 10 milyar ≥500jt	Hasil Penjualan tahunan 50 milyar ≥2,5 milyar

Politeknik membantu dari sisi akademis seperti manajemen, akuntansi, hubungan dengan perbankan, marketing, jaringan hingga mencarikan solusi praktis tentang permasalahan yang dihadapi pelaku umkm.

a. Manajemen

Manajer dan sekaligus pemilik umkm adalah orang-orang yang diminta/berusaha untuk mencapai tujuan mereka melalui orang lain di . Di tempat kerja yang sangat kompetitif dan menuntut hari ini mereka diminta untuk menampilkan keterampilan interpersonal mereka yang baik dengan membuat keputusan, mengalokasikan sumber daya dan memimpin serta mengarahkan kegiatan orang lain untuk mencapai dan mencapai tujuan mereka. Namun kelemahan dari pelaku umkm dalalahh mereka tidak pernah mempelajari manajemen secara formal, untuk itu politeknik sebagai lembaga formal membantu manajemen yang dijalankan oleh pelaku umkm.

Secara tradisional, kami telah mengikuti lima fungsi manajemen yang ditulis oleh Henry Fayol. Fungsi-fungsi manajemen ini termasuk Perencanaan, Pengorganisasian, Penguasaan, Koordinasi dan Pengendalian, Stephen P. Robbins [10].

a. 1. Perencanaan

politeknik memberikan saran dan tindakan tentang apa bagaimana memulai usaha yang akan dijalankan oleh pelaku umkm, masa depan bisnis, resiko dan tindakan praktis di lapangan.

a. 2. Pengorganisasian.

Pelaku umkm pemula banyak mengalami kesulitan bagaimana suatu usaha utu setelah dijalankan sebab semua harus dijalankan sendiri dan tidak tahu dengan siapa mereka bekerja sama selain dengan anggota keluarga

dan saudara. Peran politeknik memberikan solusi praktis menggabungkan antara usaha sejenis sehingga lebih efisien dalam pekerjaan dan menghemat tenaga.

a. 3. Penguasaan.

Pelaku umkm diharapkan setelah usahanya mampu berjalan dan bekerjasama dengan yang usaha sejenis mereka tidak puas sampai di tingkat itu tetapi mampu mandiri mengorganisasi usahanya tanpa tergantung dengan yang lain.

a. 4. Koordinasi.

Koordinasi merupakan point penting agar usaha tersebut berjalan lancar dalam menjalankan usaha, koordinasi juga memantikan bahwa tidak terjadi permasalahan dalam operasionalnya. Politeknik membantu SOP untuk memperlancar koordinasi.

a. 5. Pengendalian.

Setelah semua fungsi menejemn dijalankan maka tahap akhir yaitu pengendaliannya mutlak ada pada pemilik dan sekaligus pelaku umkm agar mampu mengendalikan usahanya.

b. Akuntansi.

Akuntansi adalah instrumen di tangan manajemen yang digunakan untuk mempromosikan dan mempertahankan citra positif perusahaan dan untuk memilih data yang tepat, yang ditawarkan untuk mendukung minat yang dikejar ", Munteanu dan Zuca [11].

Pelaku umkm biasanya tidak cukup mengetahui atau tidak memiliki pengalaman profesional yang cukup biasanya tidak mampu membuat laporan keuangan dan tidak mampu mengantisipasi dampak pilihan akuntansi pada kinerja umkm yang dijalankannya. Politeknik membantu pelaku umkm membuat akuntansi praktis sistim pencatatan dan pelaporan keuangan serta membuat pelatihan secara bertahap sampai dimengerti oleh pelaku umkm.

c. Hubungan dengan perbankan.

Beck and Laeven [12] menjelaskan terdapat dua sumber utama yang dimiliki UMKM yaitu modal dan hutang. Modal eksternal dapat berasal dari pasar modal yang pada umumnya tidak tersedia bagi Usaha Kecil dan Menengah, Shane, [13] dan sumber keuangan kedua yang tersedia adalah pinjaman bank, namun akses terhadap pinjaman bank menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM. Kelemahan umkm untuk peminjaman di bank salah satunya adalah tidak adanya laporan keuangan atau secara sederhananya tidak ada pencatatan yang jelas antara barang yang keluar dan masuk, laporan rugi laba. Maka manfaat dari pembuatan dan pelatihan pencatatan akuntansi sederhana yang dibantu oleh politeknik memudahkan jalan apabila pelaku umkm akan mengajukan dana pinjaman ke perbankan.

d. Marketing.

Ketidapercayaan terhadap kemampuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi era globalisasi berorientasi pada mekanisme pasar bebas memang cukup beralasan (Sri NA, 2012), karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam kelompok tersebut. Namun demikian perlu diingat bahwa sejak era penjajahan UMKM sudah dihadapkan dan ditempa dengan berbagai masalah termasuk dari aspek pemasaran, tetapi UMKM tetap eksis dalam mendukung perekonomian nasional.

Ketidakmampuan UMKM untuk menghadapi pasar global mungkin timbul karena lemahnya akses terhadap informasi. Kelemahan ini dapat berdampak pada sempitnya peluang pasar dan ketidakpastian harga. Di sini terlihat bahwa era bisnis global menuntut penguasaan informasi inovasi dan kreatifitas pelaku usaha, baik dari aspek teknologi maupun kualitas sumberdaya manusia. Untuk memperkenalkan produk umkm kepada masyarakat politeknik memperkenalkan dua cara yang dapat dijalankan.

Pertama memasarkan secara langsung produk hasil umkm pada acara – acara resmi kampus seperti bazar dies natalis,

bazar wisuda dan acara-acara kampus yang bersifat kewirausahaan, kedua dengan cara membuat aplikasi penjualan produk hasil umkm secara on line sehingga jangkauan marketing tidak hanya area lokal saja namun bisa menjangkau ke seluruh Indonesia.

e. Jaringan dan solusi praktis

Giddens yang merumuskan globalisasi sebagai "interkoneksi sedunia pada level kultural, politik dan ekonomi yang dihasilkan dari eliminasi hambatan-hambatan komunikasi dan perdagangan". dengan kata lain bahwa dalam menjalankan usaha pada saat ini tidak mungkin kita sendiri maka harus memiliki jaringan agar produk kita dikenal oleh konsumen, solusi praktisnya umkm bekerja sama dengan para ahli akademisi dari politeknik bagaimana berusaha yang benar dari sisi akademis dan diterapkan dalam dunia nyata.

SIMPULAN

Pesatnya perkembangan dunia usaha dan persaingan bisnis secara otomatis ikut terseretnya umkm dalam lingkaran persaingan yang kurang menguntungkan bagi pelaku umkm itu sendiri, pelaku umkm yang pola usahanya by accident dihadapkan pada persaingan usaha yang by design dengan usaha yang sudah mapan

kelas Nasional bahkan Dunia, karena pelaku umkm pada umumnya menjalankan usahanya berdasarkan pengalaman sehingga tidak mengetahui manajemen, akuntansi, hubungan dengan perbankan, marketing, jaringan dan solusi praktis permasalahan yang dihadapi umkm maka perlu adanya dukungan dari para ahli dibidangnya, sementara yang mengetahui secara pasti para akademisi selama ini tidak / belum membantu kesulitan para pelaku umkm.

Politeknik adalah perguruan tinggi vokasi yang keilmuannya aplikatif menjadi harapan baru pelaku umkm untuk bisa membantu permasalahan yang dialami pelaku umkm menghadapi persaingan dan perkembangan usaha di tengah ketidak pastian. Dengan peran Politeknik membantu dari segi manajemen, akuntansi, hubungan dengan perbankan, marketing, jaringan dan solusi praktis maka dampaknya para pelaku umkm mampu mengikuti perkembangan globalisasi dan bersaing dengan perusahaan Global.

DAFTAR PUSTAKA

- Miloš Mrva, Paulína Stachová (2014) Regional development and support of SMEs – how university project can help, Procedia - Social and Behavioral Sciences 110 (2014) 617 – 626.

Commission recommendation
2003/361/EC of 6 May 2003
concerning the definition of
micro, small and medium-sized
enterprises (notified under
document number C(2003) 1422)

Satuan Tugas Percepatan Dan
Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan Ekonomi – Pokja 1

Marková, V. (2003). Malé a stredné
podnikanie v Slovenskej
republike. [Small and medium-
sized enterprises in Slovak
republic.]. Banská Bystrica:
Univerzita Mateja Bela v BB.
ISBN 80-8055-816-7.

Dawud. 18 Oktober 2009. Program
Pendidikan Profesi Guru: Selayang
Pandang. berkarya.um.ac.id Diakses
pada 23 September 2015.

[http://simak.ui.ac.id/deskripsi-
vokasi.html](http://simak.ui.ac.id/deskripsi-vokasi.html)[https://www.ristekdikti.go.id/k
abar/menristekdikti-dorong-peran-
aktif-perguruan-tinggi
bagi-perekonomian-
daerah/#hPP2KD0dQj4uTXst.99](https://www.ristekdikti.go.id/kabar/menristekdikti-dorong-peran-aktif-perguruan-tinggi-bagi-perekonomian-daerah/#hPP2KD0dQj4uTXst.99)

Narasi 8 (Delapan) Kelompok Data
Pengembangan Sistem Informasi
Profil Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2015

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

[10] Robbins, Stephen P. 2001.
Perilaku Organisasi: Konsep,

Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1, Edisi
8, Prenhallindo, Jakarta.

Munteanu, Victor, Marilena Zuca, Alice
Tinta. Internal Audit Regulation in
Romania and Their Convergence to
European Exigencies, *Annales
Universitatis Apulensis Series
Oeconomica*, 12(1). p.267-273
2010

Beck, Thorsten, Asli Demirgüç-Kunt, Luc
Laeven, and Vojislav Maksimovic.
2006. “The Determinants of
Financing Obstacles.” *Journal of
International Money and Finance*
25: 932–952.

Shane, S. (2008). The importance of angel
investing in financing the growth
of Entrepreneurial ventures. [Online]
Available: [http://www.sba.gov/adw/
research/banking.html](http://www.sba.gov/adw/research/banking.html) (January 15,
2010).

The lectures were originally delivered in
April 1999 from a variety of
locations around the world. Go to
the next page for the first lecture on
Globalization.

